Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Upayakan Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus



Sumber gambar:

https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/22/dorong-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-pemprovkalsel-upayakan-pembangunan-ki-dan-kek/

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perindustrian (Disperin) akan terus mendorong pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berdaya saing di kancah global.

"Kedepannya kita akan merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan industri yang berada di Kabupaten dan Kota seperti, Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tabalong, Tapin dan Banjarmasin, baik itu dari segi infrastruktur jalan, pelabuhan, air baku, listrik, telekomunikasi, perumahan pekerja, fasilitas kesehatan dan pendidikan, pengolahan limbah dan infrastruktur lainnya," kata Kepala Disperin Provinsi Kalsel, Abdul Rahim usai membuka Focus Group Discussion (FGD) KI dan KEK se-Kalsel, di Banjarmasin, Kamis (22/8/2024).

Rahim menyebutkan, Kalsel telah memiliki KI Setangga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan RPJDP Kalsel 2025-2045 dengan visi Kalsel menjadi gerbang logistik Kalimantan dan salah satu Provinsi penyangga IKN yang ada di Kaltim.

Pertumbuhan industri yang pesat sekarang ini diperlukan pengembangan konektivitas infrastruktur dan ekosistem industri sehingga dapat mendorong percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan rantai nilai (value chain) dan industri yang dikembangkan.

"Kalsel memang memiliki potensi sumber daya industri yang besar, khususnya hilirisasi hasil pertambangan (mineral logam, batubara, minyak dan gas bumi), perkebunan (sawit, karet dan kayu) dan perikanan," ungkap Rahim.

Selain memiliki KI Batulicin, KI Jorong dan Sebuku Indonesia Industrial Park, lanjut Rahim, maka saat ini juga mendorong percepatan pengembangan KI Seradang di Kabupaten Tabalong yang sedang proses integrasi RDTR KPI Seradang pada OSS sehingga akan membantu calon pengelola KI Tabalong pada proses perizinan KKPR hanya pada proses konfirmasi jika sudah terintegrasi dengan OSS.

"Selain itu, potensi lain dari KI adalah KI Mantuil di Banjarmasin dan Tapin Integrated Industrial and Port Estate di Kabupaten Tapin dan KI Tarjun di Kabupaten Kotabaru," terang Rahim.

Sumber berita:

- 1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/08/22/dorong-percepatan-pertumbuhan-ekonomi-pemprov-kalsel-upayakan-pembangunan-ki-dan-kek/, 22 Agustus 2024.
- 2. https://bappeda.kalselprov.go.id/pemprov-kalsel-siap-kembangkan-kawasan-ekonomi-khusus-di-empat-kabupaten/, 3 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
- ♣ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD

